

Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi E-Bima (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Nopinus Andreas Purba^{1*}, Safuan¹

¹ Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Corresponding Author's e-mail : nopinus.andreas@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 1 January 2024

Page: 29-38

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1122>

Article History:

Received: December, 23 2023

Revised: January, 02 2024

Accepted: January, 13 2024

Abstract : Information Tecnology can be done in various ways, one of which is through the internet which can be used anywhere and anytime using the internet network. Suprime Court of Republic of Indonesia through the Finance Bireau issued E-Bima application. The E-Bima application is a system built to monitor and supervise the implementation of the budget and money deposited by third parties by the first court, high court, the echelon one, and the institutional level within the supreme court of the Republic of Indonesia. Researchers get the results if E-Bima application can provide clear and detail information in the context of monitoring and supervise of the budget in General Court of Supreme Court cf the Republic of Indonesia.

Keywords : E-Bima, Information technology, Monitoring and Supervise.

Abstrak : Teknologi informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui internet yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun menggunakan jaringan internet. Mahkamah Agung melalui Biro Keuangan menciptakan suatu aplikasi E-Bima. Aplikasi E-Bima merupakan suatu system yang dibangun untuk melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan anggaran dan uang titipan pihak ketiga oleh satker tingkat pertama, tingkat banding, tingkat unit eselon 1 dan tingkat lembaga di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Peneliti mendapatkan hasil penelitian yakni dengan aplikasi E-Bima dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam rangka monitong dan pengawasan anggaran di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Kata Kunci : E-Bima, Monitoring dan Pengawasan, Teknologi Infomasi.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Sistem Informasi memegang peranan penting dalam upaya untuk mewujudkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good government governance) sebagaimana yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai sector privat. Pemerintah berupaya menyelaraskan layanan public dan kemampuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik atau *e-government*. Dalam bidang keuangan negara, *e-government* diwujudkan dalam bentuk Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Implementasi IFMIS bertujuan mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat system penggunaan manual atau system yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansinya. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut Diamond dan Khemani (2005)

meliputi ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran serta pengendalian belanja yang berdampak buruk terhadap pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan system informasi yang andal. Jika system informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut juga kurang andal (Latifah dan Sabeni, 2007)

Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut, Mahkamah Agung melalui Biro Keuangan telah mengembangkan system aplikasi terintegrasi yang di implementasikan pada seluruh satuan kerja (satker) pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat Eselon 1 diantaranya di lingkungan peradilan umum yang berjumlah 413 satuan kerja (satker) yang terdiri dari 1 eselon, 30 Pengadilan Tingkat Banding dan 380 Pengadilan tingkat pertama. Latar belakang dibuat nya Aplikasi E-Bima berawal dari banyaknya permasalahan terkait pengumpulan data dan realisasi anggaran yang dibuat secara manual oleh satuan kerja tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga diperlukan alat monitor realisasi realiasi anggaran, pagu minus dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dapat diakses melalui web dengan membuka browser (mozilla firefox/chrome), dengan mengetik alamat <https://www.e-bima.mahkamahagung.go.id> sehingga dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan *anggaran*.



Gambar 1: Halaman Depan E-Bima

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan, secara istilah aplikasi adalah program atau software siap pakai yang di rekayasa/dirancang untuk melaksanakan suatu fungsi pengguna atau aplikasi lain yang dapat digunakan oleh sasaran yang dituju (Ghozali Iman, 2012:12)

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi akan memberikan dampak positif di dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap pemerintah akan berjalan efektif.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi -fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, dengan adanya transparansi kebohongan sulit untuk di lakukan. Transparansi berarti terbuka nya akses bagi setiap pihak yang berkepentingan terhadap berbagai informasi seperti pengelolaan anggaran yang dapat diakses.

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002). Penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan

politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent* (Von Hagen, 2000).

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja yaitu mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) terdiri dari empat tahap yang meliputi:

- a. Tahap persiapan anggaran (*preparation*).
Dalam tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.
- b. Tahap Ratifikasi (*approval/ratification*) anggaran.
Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki managerial *skill* serta *political skill* juga salesmanship dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.
- c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*approval/ratification*).
- d. Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal.
- e. Tahap pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*reporting & evaluation*).
- f. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini akan banyak menemui masalah.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis tertarik mengkaji “**Transparansi Pengelolaan Anggaran melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI**”

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi E-Bima berbasis web mempunyai fitur sebagai berikut:

- Pagu alokasi anggaran
Dengan fitur ini satuan kerja dapat memantau kondisi pagu termuktahir saat ini atau real time yang langsung terkoneksi dengan aplikasi satu DJA serta terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI
- Realisasi DIPA
Fitur ini menyajikan data realisasi DIPA secara berjenjang seluruh satuan kerja pengadilan yang berguna untuk memonitoring yang bersumber dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu RI
- Realisasi PNPB
Merupakan sarana untuk memonitoring PNPB secara real-time dan valid.
- Capaian Kinerja

E-Bima menjadi jembatan bagi seluruh pengadilan, khususnya satuan kerja tingkat banding untuk dapat memonitor capaian kinerja dari seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya dan terkoneksi dengan aplikasi SMART

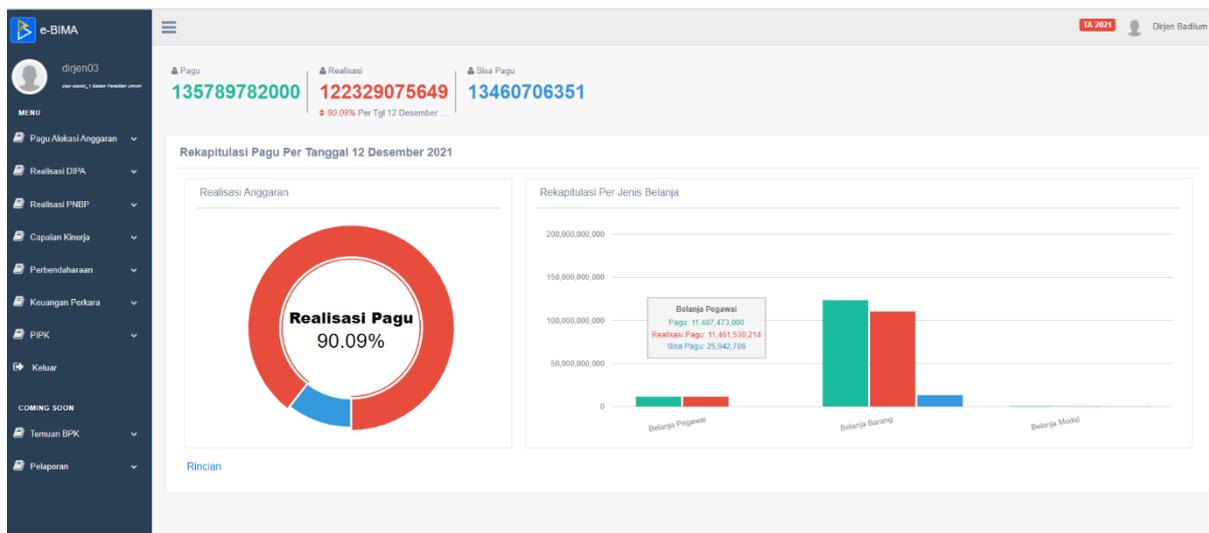
- **Perbendaharaan**
Fitur ini menyajikan data pertanggungjawaban UP secara berjenjang. Selain itu, fitur ini mampu memonitoring berita acara penutupan kas. Data yang disajikan akurat karena terhubung dengan aplikasi SAS
- **Keuangan Perkara**
Sebelum E-Bima, rekapitulasi keuangan belum menggambarkan yang sebenarnya. Sebagai gambaran, rekapitulasi keuangan perkara elektronik saat ini digunakan hanya memfasilitasi 3 buku keuangan perkara saja



Gambar 2: Tampilan Login

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-Bima

Masukkan username dan password yang telah di miliki setiap satuan kerja (satker), jika username dan password benar maka akan muncul menu dashboard seperti gambar dibawah:



Gambar 3: Halaman dashboard E-Bima

Halaman dashboard menampilkan informasi pagu, realisasi dan sisa pagu. Dari dashboard diatas menunjukkan bahwa realisasi di Lingkungan Peradilan Umum masih sebesar 90,09 % (data per 12 Desember 2021)

Pada menu pagu alokasi DIPA terdapat beberapa menu:

- a. Belanja Pegawai

Sub menu belanja pegawai digunakan untuk melihat data belanja pegawai berdasarkan total detail pagu belanja pegawai seperti dapat dilihat gambar dibawah ini

No	Kode Satker	Nama Satker	Tahun	Rincian	Nama Akun	Nama Item	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah	Action
1	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511111.1	Belanja Caji Pokok PNS	Belanja Caji Pokok PNS	1	THN	6,771,706,000	6,771,706,000	+
2	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511111.2	Belanja Caji Pokok PNS	Belanja Caji Pokok PNS (gaji ke 13)	1	BLN	464,534,000	464,534,000	+
3	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511111.3	Belanja Caji Pokok PNS	Belanja Caji Pokok PNS (gaji ke 14)	1	BLN	464,534,000	464,534,000	+
4	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511110.1	Belanja Pembulatan Caji PNS	Belanja Pembulatan Caji PNS	1	THN	99,000	99,000	+
5	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511110.2	Belanja Pembulatan Caji PNS	Belanja Pembulatan Caji PNS (gaji ke 13)	1	BLN	9,000	9,000	+
6	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511110.3	Belanja Pembulatan Caji PNS	Belanja Pembulatan Caji PNS (gaji ke 14)	1	BLN	9,000	9,000	+
7	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511121.1	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	1	THN	404,962,000	404,962,000	+
8	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511121.2	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Belanja Tunj. Suami/istri PNS (gaji ke 13)	1	BLN	33,750,000	33,750,000	+
9	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511121.3	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Belanja Tunj. Suami/istri PNS (gaji ke 14)	1	BLN	33,750,000	33,750,000	+
10	097450	Badan Peradilan Umum	2021	WA.6243.EAA.001.001.A.511122.1	Belanja Tunj. Anak PNS	Belanja Tunj. Anak PNS	1	THN	112,697,000	112,697,000	+

Gambar 4: Halaman belanja pegawai

b. Belanja Barang

Sub menu belanja barang digunakan untuk melihat data belanja barang berdasarkan total detail pagu belanja barang seperti dapat dilihat gambar dibawah ini

No	Kode Satker	Nama Satker	Tahun	Rincian	Nama Akun	Nama Item	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah	Action
1	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.521211.1	Belanja Bahan	ATK	2	KEC	6,950,000	13,900,000	+
2	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.521211.3	Belanja Jasa Profesi	Narasumber	16	GJ	1,000,000	16,000,000	+
3	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.1	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PANITIA	0		0	0	+
4	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Saku	12	OH	130,000	1,560,000	+
5	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Transport	12	Org	250,000	3,000,000	+
6	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PESERTA	0		0	0	+
7	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Saku	50	OH	130,000	6,500,000	+
8	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Transport	50	Org	250,000	12,500,000	+
9	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	HOTEL	0		0	0	+
10	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BF.1046.FAA.001.051.A.524114.8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Hotel	70	OH	450,000	31,500,000	+

Gambar 5: Halaman Belanja Barang

c. Belanja Modal

Sub menu belanja modal digunakan untuk melihat data belanja modal berdasarkan total detail pagu belanja modal seperti dapat dilihat gambar dibawah ini:

No	Kode Satker	Nama Satker	Tahun	Rincian	Nama Akun	Nama Item	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah	Kode Smpg	Kode LPSE	Menda Smpg	Aksi
1	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.051.A.032111.1	Belanja Modal Perawatan dan Masi	Laptop	7	UNT	15,000,000	105,000,000				
2	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.052.A.032111.1	Belanja Modal Perawatan dan Masi	Filing Cabinet	5	UNT	6,000,000	30,000,000				
3	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.052.A.032111.2	Belanja Modal Perawatan dan Masi	Lemari Besi/Plak	6	UNT	3,500,000	21,000,000				
4	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.051.A.033111.1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Baja Koran/Koruk Rumi Dinas	210	m ²	1,840,000	388,400,000				
5	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.051.A.033111.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Baja Perencanaan Rumi Dinas	1	LB	26,100,000	26,100,000				
6	097450	Badan Peradilan Umum	2021	BA.0243.040.001.051.A.033111.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Baja Perencanaan Rumi Dinas	1	LB	22,900,000	22,900,000				

Gambar 6: Halaman Belanja Modal

Pada menu realisasi DIPA terdiri dari beberapa menu:

a. Realisasi Per Satker

Menu ini menampilkan data pagu anggaran, nilai realisasi dan sisa pagu per satuan kerja seperti gambar dibawah ini:

No	kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	090062	Pengadilan Tinggi Jakarta (03)	618,820,000	547,204,200 (88.43 %)	71,615,800
2	090063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	1,141,626,000	945,644,000 (82.83 %)	195,982,000
3	090064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	662,030,000	596,609,390 (90.12 %)	65,420,610
4	090065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur (03)	727,621,000	436,345,287 (59.94 %)	291,275,713
5	400215	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (03)	766,337,000	724,898,550 (94.59 %)	41,438,450
6	400221	Pengadilan Negeri Jakarta Utara (03)	847,323,000	772,107,994 (91.12 %)	75,215,006
7	097450	Badan Peradilan Umum	55,171,874,000	51,414,122,661 (93.19 %)	3,757,751,339
8	090067	Pengadilan Tinggi Bandung (03)	889,991,000	784,940,730 (88.20 %)	105,050,270
9	090068	Pengadilan Negeri Bandung (03)	981,140,000	805,487,300 (82.10 %)	175,652,700
10	090069	Pengadilan Negeri Sumedang (03)	145,580,000	117,308,000 (80.58 %)	28,272,000

Gambar 7: Halaman realisasi per satker

b. Realisasi per akun

Menu ini digunakan untuk menampilkan data pagu anggaran, nilai realisasi dan sisa pagu per akun yang ada pada satker

c. Sisa Pagu Belanja Pembangunan Gedung

Menu ini digunakan untuk menampilkan sisa pagu pembangunan Gedung yang ada pada satker.

Pada menu realisasi PNPB terdapat beberapa menu diantaranya:

a. Realisasi Per satker

Menu ini menggambarkan data pagu anggaran, nilai realisasi, dan sisa pagu per satuan kerja berdasarkan PNPB, seperti gambar dibawah ini:

No	kode Satker	Nama Satker	Estimasi PNBP	Realisasi PNBP	Sisa Estimasi
1	099062	Pengadilan Tinggi Jakarta (03)	10,000,000	18,130,000 (181.30 %)	-8,130,000
2	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	3,090,236,000	1,595,806,500 (51.64 %)	1,494,429,500
3	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	743,878,000	282,960,100 (38.04 %)	460,917,900
4	099065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur (03)	1,249,174,000	283,199,000 (22.67 %)	965,975,000
5	400215	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (03)	756,795,000	353,519,000 (46.71 %)	403,276,000
6	400221	Pengadilan Negeri Jakarta Utara (03)	650,878,000	196,566,750 (30.20 %)	454,311,250
7	099067	Pengadilan Tinggi Bandung (03)	24,000,000	14,760,000 (61.50 %)	9,240,000
8	099068	Pengadilan Negeri Bandung (03)	738,000,000	467,666,700 (63.37 %)	270,333,300
9	099069	Pengadilan Negeri Sumedang (03)	23,700,000	95,088,500 (401.22 %)	-71,388,500
10	099071	Pengadilan Negeri Tasikmalaya (03)	11,500,000	33,146,000 (288.23 %)	-21,646,000

Gambar 8: Halaman realisasi per satker berdasarkan PNBP

b. Realisasi Per Akun

Menu ini menampilkan nilai estimasi PNBP, nilai realisasi PNBP, dan sisa target PNBP setiap satuan kerja per akun berdasarkan PNBP seperti gambar berikut:

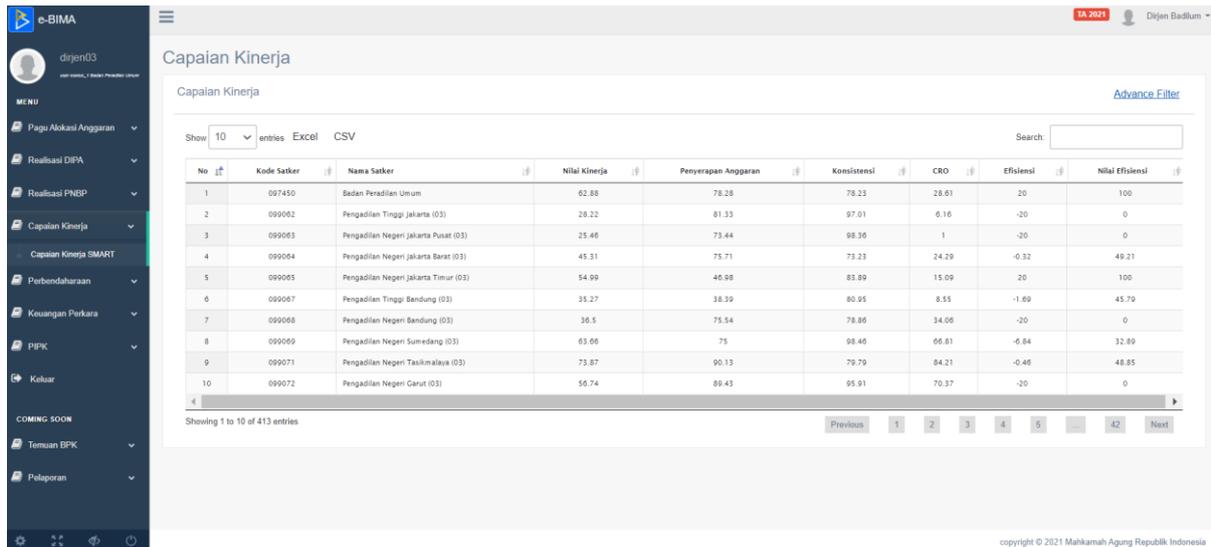
No	kode Satker	Nama Satker	Rincian	Nama Akun	Nilai Estimasi PNBP	Nilai Realisasi PNBP	Sisa Target PNBP
1	099062	Pengadilan Tinggi Jakarta (03)	2021.099062.00503.425239	Pendapatan Kekayaan dan Peradilan Lainnya	10,000,000	18,130,000	-8,130,000
2	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	2021.099063.00503.425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	2,420,000	120,000	2,300,000
3	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	2021.099063.00503.425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	8,250,000	9,790,000	-1,540,000
4	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	2021.099063.00503.425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1,468,550,000	1,172,750,000	295,800,000
5	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03)	2021.099063.00503.425239	Pendapatan Kekayaan dan Peradilan Lainnya	1,611,016,000	413,149,500	1,197,866,500
6	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	2021.099064.00503.425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	5,000,000	530,000	4,470,000
7	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	2021.099064.00503.425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	50,000,000	640,000	49,360,000
8	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	2021.099064.00503.425233	Pendapatan Ongkos Perkara	70,000,000	87,995,000	-17,995,000
9	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (03)	2021.099064.00503.425239	Pendapatan Kekayaan dan Peradilan Lainnya	618,878,000	193,795,100	425,082,900
10	099065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur (03)	2021.099065.00503.425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	2,100,000	2,370,000	-270,000

Gambar 9: Halaman realisasi PNBP per akun

c. Transaksi dalam proses

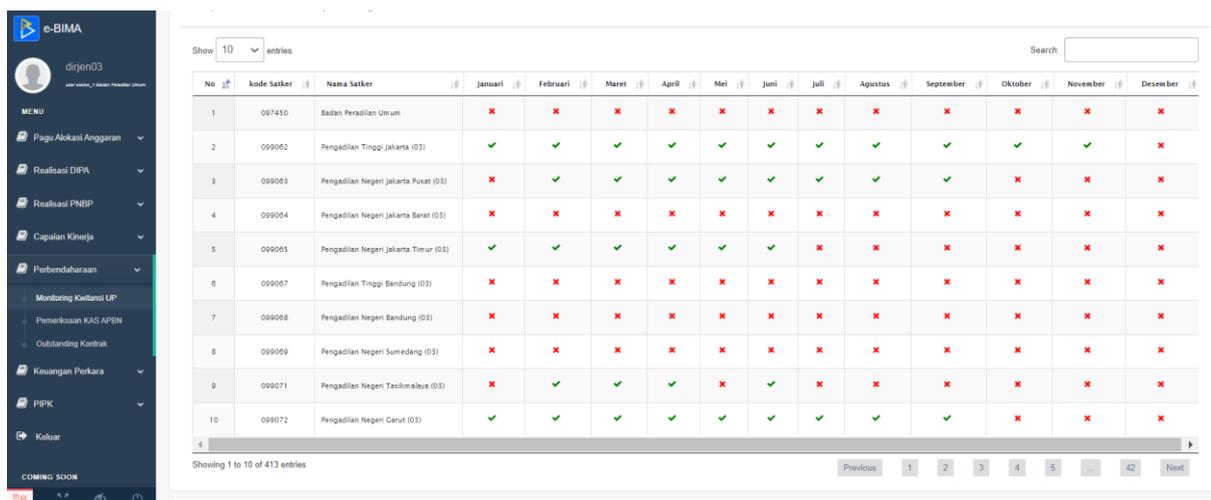
Menu ini menampilkan transaksi dalam konfirmasi (TDK) PNBP satuan kerja yang bersumber dari aplikasi SPAN Kementerian Keuangan.

Pada Menu capaian kinerja menampilkan data capaian satuan kerja yang bersumber dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan seperti yang di lihat pada gambar sebagai berikut:



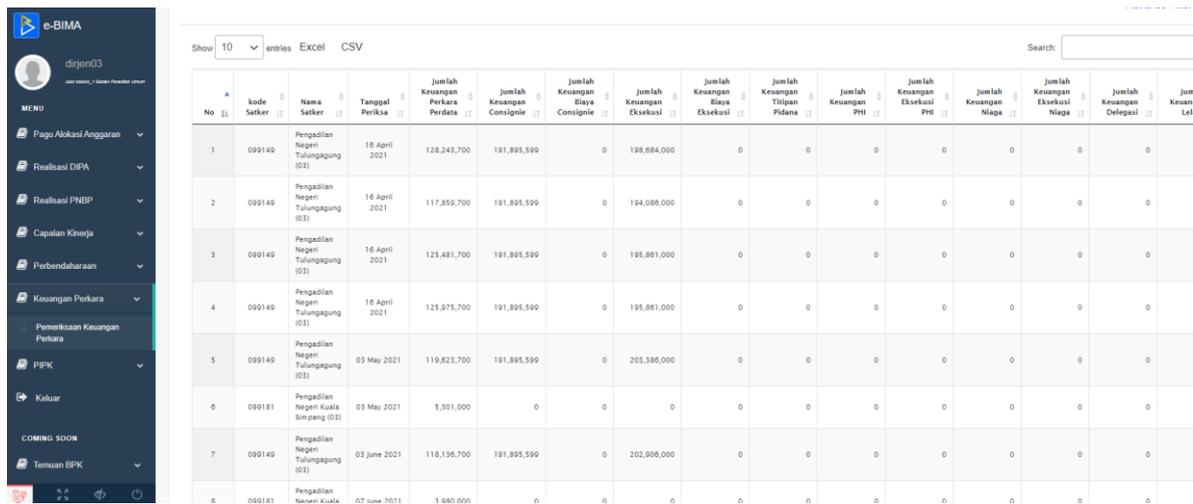
Gambar 10: Halaman capaian kinerja SMART

Pada menu perbendaharaan menampilkan monitoring Kwintansi UP yang dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan anggaran berdasarkan kuintansi yang dimiliki satker. Seperti gambar dibawah ini:



Gambar 11: Halaman Monitoring UP

Sedangkan pada menu keuangan perkara digunakan untuk pemeriksaan terhadap buku keuangan perkara secara insidental, seperti gambar dibawah ini:



No	kode Saker	Nama Saker	Tanggal Periksa	Jumlah Keuangan Perkara Perdata	Jumlah Keuangan Consignie	Jumlah Keuangan E-laya Consignie	Jumlah Keuangan Eksekusi	Jumlah Keuangan E-laya Eksekusi	Jumlah Keuangan Tiltan Pidana	Jumlah Keuangan PHI	Jumlah Keuangan Eksekusi PHI	Jumlah Keuangan Niaga	Jumlah Keuangan Eksekusi Niaga	Jumlah Keuangan Delegasi	Jumlah Keuangan Lela
1	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	16 April 2021	128.243,700	191.895,599	0	108.684,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	16 April 2021	117.859,700	191.895,599	0	104.086,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	16 April 2021	125.481,700	191.895,599	0	105.861,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	16 April 2021	125.975,700	191.895,599	0	105.861,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	03 Mei 2021	119.823,700	191.895,599	0	203.386,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	000181	Pengadilan Negeri Kuala Sim pang (03)	03 Mei 2021	5.301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	000140	Pengadilan Negeri Tulungagung (03)	03 June 2021	118.136,700	191.895,599	0	202.906,000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	000181	Pengadilan Negeri Kuala	07 June 2021	5.080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 12: Pemeriksaan Keuangan Perkara

Aplikasi E-Bima dibuat oleh Biro Keuangan dan Tim IT di Lingkungan Mahkamah Agung dengan biaya bersumber dari DIPA Mahkamah Agung. Penerapan aplikasi ini di Lingkungan Peradilan Umum diharapkan dapat membantu pimpinan satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan.

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh penulis dari aplikasi ini dapat dihasilkan:

1. Terwujudnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel karena terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan seperti Aplikasi Satu DJA, SMART dan SAS
2. Militasi laporan keuangan untuk mengurangi berbagai resiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan

Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis reward dan punishment

KESIMPULAN

Aplikasi E-Bima merupakan aplikasi berbasis web dan juga sudah dapat di gunakan di android yang di rancang oleh Biro Keuangan dan Tim IT Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di Mahkamah Agung termasuk di Lingkungan Peradilan Umum sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih transparan, efektif dan efisien.

Kekurangan aplikasi ini dilihat perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada para pengelola keuangan termasuk pimpinan pengadilan dikarenakan aplikasi e-Bima merupakan aplikasi baru yang diluncurkan bulan Oktober 2021. Disamping itu internet yang tidak stabil menjadi salah satu masalah dalam pengoperasian aplikasi ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Selain perawatan sangat diperlukan secara berkala untuk meningkatkan performance jaringan dan kedepannya diharapkan terus dilakukan pengembangan seperti dengan aplikasi ini dapat memperlihatkan temuan pemeriksaan yang terjadi di Lingkungan Peradilan Umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. *Parliament's Performance In The Budget Process: A Case Study*. Policy Matters <http://www.irpp.org>

- Diamond, J., Khemani, P. (2005). *IMF Working Paper: Introduction financial management information system in developing countries*. International Monetary Fund. Diakses dari : <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05196.pdf>
- Ghozali, Iman 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Kristianten. 2006, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Latifah, L & Sabeni A. (2007). Prosiding Simposium Akuntansi Nasional X: *Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*
- Mardiasmo. 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 (1)
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Public*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Manual Book (2021) *Aplikasi E-Bima*, Jakarta
- Sugiyono, P.D. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfa beta